



RENJA P-APBD SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan TUPOKSI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta berpedoman kepada RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka Renja P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan satu tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini. Semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran Sekretariat DPRD dalam rangka ikut serta membangun Kabupaten Bojonegoro sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan penanganan kewenangan dalam urusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan pelayanan kepada pimpinan/ seluruh stake holder .

Selanjutnya, agar dapat tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang memuat tentang tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program kerja Tahun 2024 dengan penetapan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a) Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d) Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- g) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja P-APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan target / sasaran yang ditentukan dalam Tahun 2024 dengan tugas pokok dan fungsi berikut visi yang ingin dicapai dan misi yang akan dilaksanakan, yang sekaligus akan menjadi tolok ukur kinerja dan tingkat keberhasilan yang akan dicapai dalam Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja P-APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna optimalisasi pelayanan pada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/ kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Ranwal RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan *dengan Rancangan RKPD*.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2) Pencapaian SDGs;
 - 3) Pengentasan kemiskinan;
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - 6) Pengembangan daerah terisolir;
 - 7) Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1). Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - 2). Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 4). Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan mengenai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dan tabel Rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap PD yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel T-C.29 terlampir

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Lembar :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	83%							
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	80%	61,60		88,36			92,43%	

4	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	84,70	6		94,10	15,68	6	dokumen	18479,60%	18,48
4	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	65,04	12	kali	82,69	6,89	12	dokumen	15973,05%	159,73
4	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	72,22	12	kali	95,82	7,98	12	kali	18003,68%	180,04
4	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7,76	12	kali	52,08	4,34	12	kali	7184,03%	71,84
4	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	90,43	12	kali	90,43	7,54	12	kali	19285,60%	192,86
4	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12	laporan	34,06	24	kali	92,23	3,84	24	kali	15028,61%	12,52

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	85%	59,31					74,61%	
4	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	63,28	33 orang	65,55	1,99	33 orang/bulan	16183,07%	5,22
4	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0,00	6 dokumen	0,21	0,04	6 Dokumen	621,19%	
4	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186 Dokumen	66,82	75 dokumen	95,78	1,28		16260,23%	0,87
4	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase BMD yang diadministrasikan sesuai ketentuan	85%	59,86					5986,00%	70,42
4	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	59,86	8 orang	73,97	9,25	8 orang	14183,05%	17,73
4	02	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		31 orang	0,00	12 laporan	0,00	0,00	2 laporan	200,00%	

4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	85%	43,23					4323,00%	50,86
4	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	73,99	22 unit	83,08	3,78	2 unit	15906,97%	79,53
4	02	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	90,59	33 orang	90,59	2,75	33 dokumen	21418,44%	6,91
4	02	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	56,97	12 kali	87,75	7,31	12 kali	15672,08%	13,06
4	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	0,00					0,00%	0,00
4	02	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	57,50	8 kegiatan	67,06	8,38	8 orang	13255,61%	0,27
4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	50 orang	24,08	8 kegiatan	43,00	5,37	8 orang	7507,52%	1,50

						Perundang-Undangan								
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	80%	72,34					7234,00%	90,43
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	68 Paket	84,44	68 unit	84,44	1,24	9 paket	17787,98%	2,62
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	89,76	9 unit	89,76	9,97	9 paket	18851,40%	20,95
4	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	79,77	4 unit	79,77	19,94	4 paket	16353,44%	40,88
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	54,64	52 unit	54,64	1,05	52 unit	16127,00%	3,10
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	27,43	50 unit	32,44	0,65	50 dokumen	10986,77%	2,20
4	02	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket	86,89	70 unit	87,17	1,25	70 paket	24406,26%	3,49

4	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	77,81	60	kali	80,43	1,34	60	laporan	21824,22%	218,24
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	0	0		0		100%		100,00%	0,03
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	90%		55,69							5569,00%	61,88
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	0	0		0		100%		100,00%	0,20
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	0	0		0		100%		100,00%	0,33
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	700	Unit	0	0		0		100%		100,00%	0,00
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	80%		22,06							2206,00%	27,58
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	Laporan	0,50	70	kali	0,50	0,01	70	laporan	7100,78%	1,01
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	19,97	3	jenis	23,15	7,72	3	paket	4612,27%	15,37

4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	71,16	50 kali	71,16	1,42	50 laporan	19231,10%	3,85
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 kali	0	0,00	12 laporan	1200,00%	1,00
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	80%	59,53					5953,00%	74,41
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	46,87	30 kali	49,48	1,65	30 unit	12635,17%	4,21
4	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	66,84	6 kali	66,84	11,14	6 unit	13967,81%	23,28
4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	92,09	4 unit	92,09	23,02	4 unit	18817,54%	6,27
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Peralatan	39,51	2 kali	64,07	32,03	2 unit	10557,87%	52,79
4	02	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 laporan	2 Laporan	0	2 unit	0	0,00	2 unit	200,00%	1,00

4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	99,07	2 unit	99,07	49,54	2 unit	20014,00%	100,07
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	79,65	2 unit	87,55	43,78	2 unit	16920,00%	84,60
4	02	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Sarana	65,78	1 unit	81,7	81,70	1 unit	14848,00%	148,48
4	02	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pimpinan Prosentase kebutuhan kegiatan yang difasilitasi keprotokolannya	87%	9,2					920,00%	10,57
4	02	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	9,20	60 kali	9,20	0,15	1 laporan	1940,00%	1,62
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	87% Layanan	98,03					9803,00%	112,68
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Anggota	98,39	50 orang	98,39	1,97	50 orang	24677,15%	4,94
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	87,68	50 unit	87,68	1,75	50 paket	22536,90%	112,68

4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	0,00	50 orang	14,08	0,28	50 orang	6407,80%	1,28
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan	85%	20,1					2010,00%	23,65
4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	14 Dokumen	4,23	12 keg	63,24	5,27	12 dokumen	7946,74%	5,68
4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	26,89	8 keg	26,89	3,36	8 laporan	6177,92%	7,72
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 unit	70 Laporan	47,88	70 keg	74,80	1,07	70 laporan	19267,80%	2,75
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	52 Paket	0	52 jenis	0	0,00	52 paket	5200,00%	1,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	100 %						0,00%	0,00
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Prosentase Produk Hukum yang Berhasil Ditetapkan	75%	33,6					3360,00%	44,80

4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	23,19	16 proleg da	23,19	1,45	16 dokumen	6238,48%	5,20
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	45,65	16 raperda	46,25	2,89	16 dokumen	10790,17%	8,99
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	0,00	4 kajian	31,09	7,77	2 dokumen	3309,37%	16,55
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	46,95	4 NA	47,26	11,82	1 dokumen	9521,42%	95,21
4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0,00					0,00%	0,00
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	75% Kegiatan	32,51					3251,00%	43,35
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	37,02	2 kali	37,02	18,51	4 dokumen	7804,26%	19,51
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	15,86	4 kali	15,86	3,97	4 dokumen	3572,83%	8,93
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	34,00	4 kali	48,06	12,02	4 dokumen	8606,41%	28,69
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	10,24	4 kali	10,24	2,56	4 dokumen	2448,05%	12,24

4	02	02	2,02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3 Dokumen	0,00	2 kali	0,00	0,00	2 dokumen	200,00%	0,67
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	75,11	4 kali	75,11	18,78	4 dokumen	15422,89%	51,41
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	75% Hasil	81,08					8108,00%	108,11
4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	34,11	10 kegiatan	34,11	3,41	10 laporan	7822,27%	39,11
4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	0,00	10 kegiatan	0,00	0,00	10 laporan	1000,00%	5,00
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	2,66	10 kegiatan	2,66	0,27	10 laporan	1531,16%	7,66
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	0	10 kegiatan	0	0,00	10 laporan	1000,00%	5,00

4	02	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	0	3	kegiatan	0	0,00	3	dokumen	300,00%	3,00
4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	Dokumen	0	2	kegiatan	0	0,00	2	dokumen	200,00%	1,00
4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	Dokumen	97,07	4	kegiatan	97,07	24,27	4	dokumen	19814,00%	99,07
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	90%		29,28							2928,00%	32,53
4	02	02	2,04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	100 %		100,00%	1,00
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	50 dokumen		5000,00%	1,00
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96	Dokumen	82,59	96	publikasi	82,59	0,86	96	dokumen	26118,00%	2,72
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	Orang	0,00	0	0	0,00		100 %		100,00%	0,03
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	77,76	8	orang	93,31	11,66	8	orang	17907,00%	22,38

4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20	Dokumen	18,60	10	kegiatan	28,45	2,85	20	dokumen	6705,00%	3,35
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Masyarakat Prosentase Kegiatan Serap Aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	80%	prosentase	60,44							6044,00%	75,55
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	Laporan	0,50	3	kegiatan	3,12	1,04	3	laporan	662,18%	2,21
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	Dokumen	41,36	1	dokumen	50,97	50,97	2	dokumen	9432,77%	47,16
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2	Dokumen	82,48	3	kegiatan	82,89	27,63	3	kegiatan	16836,57%	84,18
4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	DPRD Prosentase Pengaduan Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan	80%	prosentase	38,48							3848,00%	48,10
4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6	Laporan	41,85	5	kegiatan	32,39	6,48	10	laporan	8424,18%	14,04
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase bahan komunikasi dan publikasi yang dihasilkan tepat waktu	75%	Bahan	48,2							4820,00%	64,27
4	02	02	2,07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50	Dokumen	48,20	24	dokumen	68,39	2,85	96	dokumen	21258,66%	4,25
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase kegiatan pelaksanaan	80%	kegiatan	50,09							5009,00%	62,61

						tugas DPRD yang sesuai rencana											
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5	Dokumen	54,75	72	kegiata n	59,2 5	0,82	5	doku men	11900,25%	23,80
4	02	02	2,08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Laporan	13,06	1	dokum en	43,1 8	43,18	1	lapora n	5724,40%	57,24
4	02	02	2,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	42,61	18	kegiata n	42,6 1	2,37	15	doku men	10022,38%	8,35
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20	Dokumen	32,76	20	kegiata n	36,9 8	1,85	20	doku men	8974,05%	4,49

a. Dari tabel T-C.29 sebagaimana terlampir, disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan yang capaian kinerjanya kurang maksimal yaitu 0% pada kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Orientasi DPRD dan Penyusunan Program Kerja DPRD Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya tercapai sesuai target dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kebijakan/ tindak lanjut yang diambil adalah menjalin Kerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten.

b. Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro

Capaian sesuai Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
1.	Indek kepuasan DPRD	3,30 dari Skala 4	-
2.	Persentase pembahasan Raperda dan Non Raperda yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	90%
3.	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	80 (BB)	B
4.	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat DPRD	85%	86,98%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretariat DPRD mempunyai tugas **“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan”**

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, diimplementasikan dalam program/ kegiatan yang merupakan fasilitasi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Struktur Organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, terdiri atas :

2.1.1.1 Sekretaris DPRD

2.1.1.2 Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

2.1.1.3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

2.1.1.4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Bojonegoro

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan		80%	83%	83%	83%					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan		87%	80%	80%	80%	88,36	33,21			
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		6 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	94,10	63,40	25%	50%	
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan		12 kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	82,69	23,96	25%	50%	
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan		12 kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95,82	0,00	25%	50%	
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan		12 kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52,08	61,07	25%	50%	

1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan		12 kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,43	0,00	25%	50%	
1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan		24 kali	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	92,23	30,55	25%	50%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan		85%	85%	85%	85%	61,74	46,71	25%	50%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang layanan gaji dan tunjangannya disediakan		33 Orang	30 Orang	31 orang/ bulan	31 orang/ bulan	65,55	46,76	25%	50%	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan		75 dokumen	75 dokumen	186 dokumen	186 dokumen	95,78	43,47	25%	50%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase BMD yang diadministrasikan sesuai ketentuan		85%	85%	85%	85%	73,97	56,9			
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan yang dibayar		8 orang	8 orang	8 Dokumen	8 Dokumen	73,97	57,25	25%	50%	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan		80%	80%	80%	80%	57,36	34,17			
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai yang disediakan		2 unit	2 kegiatan	2 unit	2 unit	83,08	22,65	25%	50%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang disediakan		50 stel				0,00		25%	50%	
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang diolah data kepegawaianya		33 orang	30 Orang	31 dokumen	31 dokumen	90,59	0,00	25%	50%	

4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi yang dilakukan		12 kali	12 kali	12 dokumen	12 dokumen	87,75	24,06	25%	50%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					38 orang	38 orang			25%	50%	
4.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilakukan		8 kegiatan	8 kegiatan	5 Orang	5 Orang	67,06	0,00	25%	50%	
4.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan		8 kegiatan	8 kegiatan	50 Orang	50 Orang	43,00	50,94	25%	50%	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan		80%	80%	80%	80%	73,09	40,6			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		68 unit	68 unit	68 paket	68 paket	84,44	40,78	25%	50%	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		9 unit	9 unit	9 Paket	9 Paket	89,76	37,88	25%	50%	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		4 unit	4 unit	4 Paket	4 Paket	79,77	18,36	25%	50%	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		52 unit	52 unit	52 Paket	52 Paket	54,64	58,33	25%	50%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan		80 unit				95,56		25%	50%	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan		50 unit	50 unit	50 Dokumen	50 Dokumen	32,44	12,63	25%	50%	

5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material disediakan		70 unit	70 unit	70 Paket	70 Paket	87,17	38,65	25%	50%	
5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		60 kali	60 kali	1 laporan	1 laporan	80,43	50,32	25%	50%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					36 laporan	36 laporan			25%	50%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD yang disediakan sesuai ketentuan		85%		80%	80%	55,69				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/jabatan dinas yang disediakan		1 unit		4 unit	0 unit	0		25%	50%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 unit	0 unit			25%	50%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		9 unit		150 unit	10 unit	82,58		25%	50%	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan		70%	70%	80%	80%	24,49	19,91			
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan		70 Kali	70 Kali	70 laporan	70 laporan	0,50	0	25%	50%	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan pdam yang disediakan		3 jenis	3 jenis	3 laporan	3 laporan	23,15	20,4	25%	50%	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		50 kali	50 kali	50 laporan	50 laporan	71,16	26,12	25%	50%	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Kali	12 Kali	12 laporan	12 laporan	0,00	14,69	25%	50%	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD yang dipelihara sesuai ketentuan		70%	70%	80%	80%	65,04	40,25			

8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan yang disediakan tepat waktu		30 kali	30 kali	30 unit	30 unit	49,48	46,77	25%	50%	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan		6 kali	6 kali	6 unit	6 unit	66,84	31,61	25%	50%	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		4 unit	4 unit	30 unit	15 unit	92,09	0	25%	50%	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa yang disediakan		2 kali	2 kali	2 Unit	2 Unit	64,07	20,77	25%	50%	
8.5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara		2 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	0,00	73,07	25%	50%	
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		2 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	99,07	25,99	25%	50%	
8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		2 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	87,55	46,88	25%	50%	
8.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasanana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	81,7	50,73	25%	50%	
9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kebutuhan kegiatan yang difasilitasi keprotokolerannya		80%	80%	87%	87%	9,20	0			
9.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi Keprotokolan		60 kali	60 kali	12 laporan	12 laporan	9,20	0	25%	50%	

10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan		85%	85%	87%	87%	98,07	66,05			
10.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasi keuangan		50 Orang	50 Orang	50 Orang/Bul	50 Orang/Bul	98,39	66,53	25%	50%	
10.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan		50 unit	50 unit	2 Paket	2 Paket	87,68	0	25%	50%	
10.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah medical check up yang dilaksanakan		50 orang	50 orang	50 Orang	50 Orang	14,08		25%	50%	
11	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan		84%	84%	85%	85%	49,09	17,38			
11.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah kegiatan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi		12 keg	12 keg	14 Dokumen	14 Dokumen	63,24	0	25%	50%	
11.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kegiatan Fraksi DPRD yang difasilitasi		8 keg	8 keg	8 Laporan	8 Laporan	26,89	48,76	25%	50%	
11.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang difasilitasi		70 keg	70 keg	70 Laporan	70 Laporan	74,80	6,33	25%	50%	
11.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan		52 jenis	52 jenis	52 Paket	52 Paket	0,00	0	25%	50%	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu ; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan		10 layanan	84%	100%	100%	0,00				
12	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan		75%	75%	75%	75%	37,35	22,44	25%	50%	

12.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah prolegda yang difasilitasi penyusunannya		16 Prolegda	16 Prolegda	12 Dokumen	12 Dokumen	23,19	29,41	25%	50%	
12.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah raperda yang difasilitasi pembahasannya		16 Raperda	16 Raperda	12 Dokumen	12 Dokumen	46,25	18,94	25%	50%	
12.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang Undangan yang difasilitasi		4 kajian	4 kajian	2 Dokumen	2 Dokumen	31,09	31,11	25%	50%	
12.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang difasilitasi		4 NA	4 NA	1 Dokumen	1 Dokumen	47,26	0	25%	50%	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00		25%	50%	
13	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan		7 keg	7 keg	75%	75%	36,22	22,14			
13.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS yang difasilitasi		2 kali	2 kali	4 Dokumen	4 Dokumen	37,02	47,48	25%	50%	
13.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan Perubahan KUA PPAS yang difasilitasi		4 kali	4 kali	4 Dokumen	4 Dokumen	15,86	0	25%	50%	
13.3	Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan Pembahasan APBD yang difasilitasi		4 kali	4 kali	3 Dokumen	3 Dokumen	48,06	0	25%	50%	
13.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan Pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi		4 kali	4 kali	2 Dokumen	2 Dokumen	10,24	0	25%	50%	
13.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi		2 kali	2 kali	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	94,66	25%	50%	
13.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah kegiatan pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi		4 kali	4 kali	3 dokumen	3 dokumen	75,11	60,6	25%	50%	

14	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu		75%	75%	75%	75%	81,08	37,97			
14.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi		10 Kegiatan	10 Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	34,11	0	25%	50%	
14.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi		10 kegiatan	10 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0	25%	50%	
14.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		10 kegiatan	10 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	2,66	0	25%	50%	
14.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi		10 kegiatan	10 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0	25%	50%	
14.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi		3 kegiatan	3 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0	25%	50%	
14.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi		2 kegiatan	2 kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	50,86	25%	50%	
14.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi		4 kegiatan	4 kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	97,07	62,17	25%	50%	

15	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus		80%	80%	80%	80%	38,45	59,29			
	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi melaksanakan orientasi		50 orang	50 orang	1 dokumen	0 dokumen	0,00		25%	50%	
	Pendalaman Tugas DPRD					50 dokumen	50 dokumen			25%	50%	
15.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan		96 publikasi	96 publikasi	96 dokumen	96 dokumen	82,59	56,42	25%	50%	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan		8 Orang		30 orang	30 orang	0,00		25%	50%	
15.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	93,31	57,58	25%	50%	
15.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan kehumasan yang difasilitasi		10 Kegiatan	20 kegiatan	20 dokumen	20 dokumen	28,45	50	25%	50%	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD yang disusun		1 kegiatan				0,00		25%	50%	
15.2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi melaksanakan bimtek		50 orang	50 orang			24,36		25%	50%	
16	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase kegiatan serap aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan		80%	80%	80%	80%	61,86	37,42			
16.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi		3 Kegiatan	20 Kegiatan	3 laporan	3 laporan	3,12	8,08	25%	50%	
16.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		1 dokumen	150 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,97	41,11	25%	50%	
16.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses anggota DPRD yang difasilitasi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	82,89	43,27	25%	50%	
17	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pengaduan pelanggaran kode etik yang diselesaikan		80%	80%	80%	80%	39,90	26,34			

17.1	Penyusunan kode etik	jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun		70 dokumen	70 dokumen	6 laporan	6 laporan	43,04		25%	50%	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi		5 kegiatan		6 laporan	10 laporan	32,39	26,34	25%	50%	
18	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase bahan komunikasi dan publikasi yang dihasilkan tepat waktu		75%	75%	75%	75%	68,39	47,36			
18.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun		24 dokumen	24 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	68,39	47,36	25%	50%	
19	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana		80%	80%	80%	80%	54,33	57,27			
19.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD yang difasilitasi		72 kegiatan	108 kegiatan	5 Dokumen	5 Dokumen	59,25	60,26	25%	50%	
19.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	43,18	0	25%	50%	
19.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah kegiatan pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi		18 kegiatan	23 kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	42,61	52,27	25%	50%	
19.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan Tugas Pimpinan DPRD yang difasilitasi		20 kegiatan	20 kegiatan	20 dokumen	20 dokumen	36,98	45,87	25%	50%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perubahan peraturan perundang-undangan secara dinamis harus diikuti dengan pola pikir yang tanggap akan tuntutan perubahan. Tanggap akan tata kelola administrasi keuangan ataupun tata kelola sumber daya manusia nya yang terus melaju mengikuti perkembangan teknologi.

Sistem tata kelola keuangan yang terintegrasi dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Perubahan peraturan terkait SOTK harus secara cerdas dicermati apa yang menjadi tantangan, peluang dan hambatannya.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah bagaimana terus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dalam segala bidang dan selalu ada peningkatan kualitas.

Hambatan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, menyebabkan setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan anggaran, penyusunan dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan secara terpisah. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang paham informasi teknologi (IT), sedangkan jumlah pegawai yang ada sangat terbatas. Serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, belum sepenuhnya mendukung tercapainya peningkatan kapasitas tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan. Berikut tabel review T-C.31 terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

No.	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	83%	39.955.739.243	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	83%	47.842.251.861	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	80%	81.297.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	80%	81.297.750	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.980.180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.980.180	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.023.560	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.023.560	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.844.040	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.844.040	

			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.190.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.190.800	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.264.920	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.264.920	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	13.994.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	13.994.250	

I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	85%	4.871.028.206	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	85%	4.871.028.206	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bul	4.466.967.538	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bul	4.466.967.538	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD			404.060.668	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186 dokumen	404.060.668	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Prosentase BMD yang diadministrasikan sesuai ketentuan	85%	250.014.828	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Prosentase BMD yang diadministrasikan sesuai ketentuan	85%	250.014.828	
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	250.014.828	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	250.014.828	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	80%	1.781.406.174	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	80%	1.611.406.174	
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	75.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	75.500.000	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	42.574.674	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	42.574.674	

13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	285.362.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	35.362.000	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 orang	100.000.000	
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	757.969.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	757.969.500	
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	600.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	600.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	80%	1.409.246.580	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan		80%	1.659.246.580	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	68 paket	15.075.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	68 paket	15.075.000	

18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	173.608.240	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	173.608.240	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	476.673.458	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	476.673.458	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	32.328.780	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	32.328.780	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	21.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	21.600.000	
22	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket	516.405.000	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket	516.405.000	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	173.556.102	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	173.556.102	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	250.000.000						kegiatan baru menyesuaikan kebutuhan sesuai nomenklatur kemendagri 050 5889 Tahun 2021
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan	90%	8.156.512.618						

			pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan							
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	901.468.618					Kebutuhan kendaraan bagi pimpinan DPRD periode baru
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.255.044.000					Menyesuaikan kebutuhan kendaraan operasional
	Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	700 unit	6.000.000.000					Menyesuaikan kebutuhan meubelair gedung baru
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	80%	1.067.985.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	90%	1.067.985.740
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70 Laporan	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70 Laporan	11.000.000
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	840.701.340	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	840.701.340

26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretari at DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	216.284.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretari at DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	216.284.400	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase BMD yang dipelihara sesuai ketentuan		1.225.643.369	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase BMD yang dipelihara sesuai ketentuan	80%	1.375.643.369	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretari at DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	373.284.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretari at DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	373.284.080	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretari at DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	264.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretari at DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	264.100.000	
	Pemeliharaan Mebel	Sekretari at DPRD	50 Dokumen	4 Unit	150.000.000						Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan meubelair lama
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretari at DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	134.714.040	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretari at DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	134.714.040	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretari at DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	83.993.687	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sekretari at DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	83.993.687	

			Dipelihara/Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	369.551.562	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	369.551.562	
I.8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase kebutuhan kegiatan yang difasilitasi keprotokolerannya	87%	50.855.650	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase kebutuhan kegiatan yang difasilitasi keprotokolerannya	87%	50.855.650	
32	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	50.855.650	Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	50.855.650	
I.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	87%	28.486.289.177	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	87%	28.486.289.177	
33	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bul	28.115.989.177	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bul	28.115.989.177	
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	52 Paket	295.300.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	295.300.000	
35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75.000.000	
I.10	Layanan Administrasi DPRD		Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan	85%	731.971.769	Layanan Administrasi DPRD		Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan	85%	231.971.769	

36	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	390.322.001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	14 Dokumen	210.322.001	
37	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	341.649.768	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	21.649.768	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu ; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	100%	26.164.347.915	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu ; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	100%	28.335.510.297	
II. 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan	75%	2.868.812.937	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan	75%	3.048.812.937	
38	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	626.386.873	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	626.386.873	
39	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	2.086.675.221	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	2.066.675.221	
40	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	155.750.843	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	155.750.843	

	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000						Menyesuaikan adanya pelantikan anggota DPRD periode baru
II. 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	75%	1.782.103.285	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	75%	1.782.103.285	
41	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	344.148.390	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	344.148.390	
42	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	354.127.294	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	354.127.294	
43	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	357.559.650	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	357.559.650	
44	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	355.681.063	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	355.681.063	
45	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3 Dokumen	12.992.384	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3 Dokumen	12.992.384	
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	357.594.504	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	357.594.504	
II. 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	75%	896.065.495	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	75%	896.065.495	

47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	64.875.056	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	64.875.056	
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	64.875.056	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	64.875.056	
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	64.875.056	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	64.875.056	
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	64.875.056	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	64.875.056	
51	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	79.618.340	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	79.618.340	
52	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	47.400.610	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	47.400.610	
53	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	2 Dokumen	509.546.321	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	2 Dokumen	509.546.321	

			Pertanggungjawaban Kepala Daerah					Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
II. 4	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	80%	3.866.522.500	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	80%	5.320.522.500	
54	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	3.546.000.000	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.000.000.000	
55	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96 Dokumen	300.522.500	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	3.500.000.000	
56	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96 Dokumen	300.522.500	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 orang	180.000.000	Menyesuaikan kebutuhan pendampingan pakar dan tim ahli rapat2					
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	320.000.000	menyesuaikan kebutuhan sesuai anggota baru					
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20.000.000						
II. 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Prosentase kegiatan serap aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	80%	4.756.870.436	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Prosentase kegiatan serap aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	80%	3.455.486.270	

57	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	200.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	200.000.000	
58	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	202.717.938	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	352.717.938	
59	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.354.152.498	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.902.768.332	
II. 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Prosentase pengaduan pelanggaran kode etik yang diselesaikan	80%	429.360.350	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Prosentase pengaduan pelanggaran kode etik yang diselesaikan	80%	429.360.350	
60	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	429.360.350	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	429.360.350	
II. 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Prosentase bahan komunikasi dan publikasi yang dihasilkan tepat waktu	75%	168.469.116	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Prosentase bahan komunikasi dan publikasi yang dihasilkan tepat waktu	75%	168.469.116	
61	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen	168.469.116	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	50 Dokumen	168.469.116	
II. 8	Fasilitasi Tugas DPRD		Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	80%	11.396.143.796	Fasilitasi Tugas DPRD		Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	80%	13.234.690.344	
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	9.070.013.426	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	10.100.000.000	

63	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	45.315.344	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	45.315.344	
64	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 Dokumen	1.069.375.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 Dokumen	1.089.375.000	
65	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	1.211.440.026	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	2.000.000.000	
TOTAL					66.120.087.158						76.177.762.158

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan yang masuk ke Sekretariat DPRD, adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tidak mengakomodir usulan-usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten, sebagaimana tabel T-C.32 terlampir.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro
Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020– 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi yang ingin dicapai pada masa ini adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD telah habis sebelum pemilu serentak tahun 2024, akan diberlakukan 3 (tiga) hal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- 1) Bagi Daerah yang Kepala Daerahnya masa bakti telah habis sebelum pemilu serentak tahun 2024, maka akan dipilih melalui pemilu serentak tahun 2024.
- 2) Selama masa menunggu Kepala Daerah yang baru hasil pemilu serentak tahun 2024, maka Kepala Daerah akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur/ Bupati/ Walikota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3) RPJMD yang telah habis masa berlakunya sebelum pemilu serentak tahun 2024, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai Inmendagri Nomor 52 tahun 2022.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 sesuai arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025, yaitu :

Pembangunan. Pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan pada memantapkan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian berbasis industri migas dan turunannya yang memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara merata; peningkatan peran agrobisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan; peningkatan peran jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian perkotaan; dan peningkatan kinerja birokrasi. Tujuan akhir dari arah kebijakan pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pemantapan kemandirian ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemantapan agroindustri yang menyentuh seluruh wilayah; pemantapan jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian; dan pemantapan standar pelayanan minimal (SPM) kebutuhan dasar kepada masyarakat.”

A. Visi dan Misi

Memperhatikan perubahan cara pandang dan peranan perencana pada masa yang akan datang yakni sebagai perencana yang mengedepankan perannya sebagai fasilitator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan diri menghadapi dan mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.

Dalam penetapan Visi dan Misi, Sekretariat DPRD mengacu kepada visi Kabupaten Bojonegoro yakni **“Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing”**. Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati secara tidak langsung (sesuai dengan tugasnya) dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya mempunyai kewajiban dan menjadi motor penggerak terhadap visi Kabupaten Bojonegoro sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana untuk pencapaian Visi tersebut, Misi yang diemban adalah,

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan local;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi, Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitasi tugas dan fungsi DPRD ; Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	- Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur. - Meningkatkan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

3.3. Program dan Kegiatan

Program/ kegiatan/ sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil mapping sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada Sekretariat DPRD sebagaimana Tabel T-C.33 terlampir.

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BOJONEGORO

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembar 1 dari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Kelua ran Sub Kegia tan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjaban APBD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggungjaban APBD	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layana n DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layanan	3 Dokumen	80 %	357.594.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Layan an	357.601.290
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								896.065.495	898.080.350				

4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layanan	2 Laporan	85 Person	64.875.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Layanan	64.921.405
4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layanan	2 Laporan	85 Person	64.875.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Layanan	64.921.405

4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layanan	2 Laporan	85 Person	64.875.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Layanan	64.921.405
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layanan	2 Laporan	85 Person	64.875.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Layanan	64.921.405

4	02	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	1 Doku men	85 Perse n	79.618.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	81.321.455
4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	2 Doku men	85 Perse n	47.400.610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	47.406.715

4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	2 Doku men	85 Perse n	509.546.321	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	509.666.560
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD								1.666.522.500					1.685.660.820
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	50 Doku men	80 Perse n	1.346.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	1.475.000.000

4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	96 Doku men	80 Perse n	300.522.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	190.660.820
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	20 Doku men	80 Perse n	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	20.000.000
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								2.256.870.436					2.160.167.369

4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	3 Lapo ran	80 Perse n	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	346.660.000
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	2 Doku men	80 Perse n	202.717.938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	10 Laya nan	200.295.795

4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	3 Doku men	80 Perse n	1.854.152.498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan akan sesuai ketentuan	10 Laya nan	1.613.211.574
4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								429.360.350				429.360.700	
4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan akan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	6 Lapor an	80 Perse n	429.360.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan akan sesuai ketentuan	10 Laya nan	429.360.700

4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								168.469.116				106.565.320
4	02	02	2,07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan akan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	50 Doku men	80 perse n	168.469.116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laya nan	106.565.320
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD								13.654.628.228				13.761.297.310
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan akan sesuai	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DPRD	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Layan an	5 Lapo ran	80 Perse n	10.475.812.884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laya nan	10.577.141.685

						ketentua n									ketentua n		
4	0 2	0 2	2,0 8	0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomenda i hasil pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Indeks Kepuas an DPRD : Indeks Kepuas an Masyar akat Terhad ap Layana n DPRD	Kab. Bojoneg oro, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	10 Layan an	1 Lapor an	80 Perse n	45.315.344	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomenda i hasil pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n	10 Laya nan	45.405.625
4	0 2	0 2	2,0 8	0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomenda i hasil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks Kepuas an DPRD : Indeks Kepuas an Masyar akat Terhad ap Layana n DPRD	Kab. Bojoneg oro, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	10 Layan an	12 Doku men	80 Perse n	1.069.375.0 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomenda i hasil	10 Laya nan	1.069.375.00 0

						pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n									pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n		
4	0 2	0 2	2,0 8	0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomen dai hasil pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD : Indeks Kepuasan Masyar akat Terhad ap Layana n DPRD	Kab. Bojoneg oro, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	10 Layan an	20 Doku men	80 Perse n	2.064.125.0 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapk an tepat waktu; Prosentase rekomen dai hasil pengawa san yang disampai akan sesuai ketentua n	10 Laya nan	2.069.375.00 0
TOTAL													62.569.63 3.118				63.489.388. 830

BAB IV

RENCANA KERJA P-APBD DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) P-APBD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam P-APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja dan Pendanaan PD dirinci sebagaimana pada tabel SIPD terlampir.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Bojonegoro
P-APBD Tahun 2024**

Unit Organisasi :
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat
DPRD
Sub Unit Organisasi :
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat
DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana P-APBD Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Sekretariat DPRD									101.884.112.913	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									101.884.112.913	
4	02				SEKRETARIAT DPRD									101.884.112.913	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									51.295.076.651	
4	02	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									181.623.500	
4	02	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	10 Dokumen	80 Persen	29.764.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Dokumen	80 Persen	14.873.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Dokumen	80 Persen	17.959.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Dokumen	80 Persen	4.052.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Dokumen	80 Persen	4.052.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	12 Laporan	80 Persen	110.922.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.883.407.486	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	31 Orang/bulan	85 Persen	4.483.664.585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase kegiatan layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	186 Dokumen	85 Persen	399.742.901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							248.872.928		
4	02	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase BMD yang diadministrasikan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	8 Dokumen	85 Persen	248.872.928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.986.803.186		
4	02	01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	2 Unit	85 Persen	356.842.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	31 Dokumen	85 Persen	36.475.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	12 Dokumen	85 Persen	35.362.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	38 Orang	85 Persen	540.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	500 Orang	85 Persen	415.743.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	50 Orang	85 Persen	601.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							5.064.468.661	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	68 Paket	80 Persen	19.753.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	9 Paket	80 Persen	3.873.158.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	4 Paket	80 Persen	241.314.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	52 Paket	80 Persen	328.773.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Kantor Sek. DPRD	83 Persen	20 Paket	80 persen	242.094.960	
4	02	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	50 Dokumen	80 Persen	11.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Laporan	80 Persen	115.803.791	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	36 Laporan	80 Persen	232.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.909.849.831	
4	02	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	4 Unit	90 Persen	1.050.999.431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	700 Unit	90 Persen	1.858.850.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								941.497.600	
4	02	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	70 Laporan	80 Persen	8.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	3 Laporan	80 Persen	832.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	50 Laporan	80 Persen	100.521.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.607.293.515	
4	02	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	30 Unit	80 Persen	283.662.372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	6 Unit	80 Persen	372.986.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	30 Unit	80 Persen	21.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	2 Unit	80 Persen	201.479.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	2 Unit	80 Persen	3.140.502.319	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Unit	80 Persen	586.713.424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								56.003.100	
4	02	01	2.1 4	01	Fasilitasi Keprotokolan									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Prosentase kebutuhan kegiatan yang difasilitasi keprotokolerannya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	12 Laporan	87 Persen	56.0003.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								30.280.606.844	
4	02	01	2.1 5	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	50 Orang/Bulan	87 Persen	29.579.032.978	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.1 5	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	3 paket	87 Persen	626.573.866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.1 5	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Prosentase layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	50 Orang	87 Persen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD								32.350.000	
4	02	01	2.1 6	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
						Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	14 Dokumen	85 Persen	31.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.1 6	02	Fasilitasi Fraksi DPRD									

					Prosentase kegiatan layanan penunjang Pemerintah Daerah yang disediakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Prosentase layanan administrasi DPRD yang sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83 Persen	1 Laporan	85 Persen	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							50.691.336.262	
4	02	02	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							4.114.339.476	
4	02	02	2.0 1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase Produk Hukum yang Berhasil Ditetapkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	75 Persen	1.223.504.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 1	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Prosentase Produk Hukum yang Berhasil Ditetapkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	75 Persen	2.533.207.191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 1	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Prosentase Produk Hukum yang Berhasil Ditetapkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	75 Persen	147.319.018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 1	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Prosentase Produk Hukum yang Berhasil Ditetapkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	75 Persen	210.308.767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02	2.0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran								2.615.481.531	
4	02	02	2.0 2	01	Pembahasan KUA dan PPAS									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	75 Persen	411.188.391	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 2	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	75 Persen	427.410.768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 2	03	Pembahasan APBD									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	75 Persen	906.929.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 2	04	Pembahasan APBD Perubahan									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	75 Persen	416.584.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 2	05	Pembahasan Laporan Semester									

					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	75 Persen	12.657.505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prosentase kegiatan pembahasan KUA PPAS yang diselenggarakan sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	75 Persen	440.711.559	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							611.269.555	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	75 Persen	6.881.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	75 Persen	6.881.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	75 Persen	6.881.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02	2.0 3	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	75 Persen	6.881.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 3	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	75 Persen	7.661.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 3	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	75 Persen	20.736.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 3	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
						Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab n Kepala Daerah	Prosentase hasil kegiatan pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	75 Persen	555.347.342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD								4.957.023.204	
4	02	02	2.0 4	01	Orientasi DPRD									

					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	80 Persen	677.593.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	50 Dokumen	80 Persen	2.746.032.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Orang	80 Persen	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	8 Orang	80 Persen	341.933.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	20 Dokumen	80 Persen	20.385.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan								

					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase Anggota DPRD yang difasilitasi dan lulus	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	96 Dokumen	80 Persen	991.079.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							3.337.227.926	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Prosentase Kegiatan Serap Aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Laporan	80 Persen	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Prosentase Kegiatan Serap Aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	80 Persen	310.061.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Prosentase Kegiatan Serap Aspirasi yang hasilnya sesuai ketentuan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	80 Persen	3.003.166.026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							485.038.644	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD								

					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Pengaduan Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6 Laporan	80 Persen	485.038.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah							159.366.031	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Prosentase bahan komunikasi dan publikasi yang dihasilkan tepat waktu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	50 Dokumen	75 Persen	159.366.031	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							34.411,589.895	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Dokumen	80 Persen	25.528.395.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	80 Persen	45.535.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								

					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	80 Persen	1.786.907.890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
					Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu; Prosentase rekomen dan hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prosentase kegiatan pelaksanaan tugas DPRD yang sesuai rencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	20 Dokumen	80 Persen	7.050.750.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB V

PENUTUP

Renja P-APBD 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholder*) dalam menciptakan *good governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan dirasakan sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dokumen Renja P-APBD 2024 disusun dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal;
2. Kegiatan lanjutan dan kegiatan penyempurnaan dari hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. Kaidah Pelaksanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja P-APBD Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan;
3. Pada akhir tahun anggaran 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja P-APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro serta sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Veteran No.84 Telp. (0353) 881745, Fax. (0353) 881745
BOJONEGORO 62115

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 175 / 7.1 / 412.050 / 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) P-APBD
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) P-APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Kerja P-APBD Tahun 2024;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun Rancangan Renja P-APBD Tahun 2024;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 1 Juli 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199003 1 012

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 175 / 7.1 / 412.050/2024
Tanggal : 1 Juli 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) P-APBD
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1.	Pengarah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Analisis Anggaran Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	a. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Pranata Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. e. Analisis Kebijakan Ahli muda Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Analisis Kebijakan Ahli muda Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Analisis Kebijakan Ahli muda Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. h. Analisis Anggaran Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199003 1 012